

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENGAWASAN HASIL SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam memastikan pemegang sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar memiliki kompetensi dalam masa kepemilikan sertifikat;
 - b. bahwa untuk memelihara mutu sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pengawasan (Surveillance) Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Lembaga Kebijakan Kepala Pengadaan Keputusan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengawasan Hasil Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat:

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWASAN HASIL SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Pengawasan Hasil Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memverifikasi dan memvalidasi perangkat asesmen dan/atau materi uji kompetensi dalam pelaksanaan asesmen;
- b. melaksanakan asesmen; dan
- c. merekomendasikan hasil Pengawasan Hasil (Surveillance) kepada komite sertifikasi.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT:

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2014.

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengawasan Hasil Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014:

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS KAHARDJO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. Direktur Sertifikasi Profesi;
- 5. PPK Direktorat Sertifikasi Profesi;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN LEMBAGA

KEPALA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWASAN HASIL SERTIFIKASI PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR TANGGAL : 24 TAHUN 2014

: 20 Januari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGAWASAN HASIL SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo	_
			2. Eiko Whismulyadi	-
			3. Agus Prabowo	-
			4. Ikak Gayuh Patriastomo	
			5. Robin Asad Suryo	-
2.	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	_
3.	Anggota	:	1. Dharma Nursani	500.000
			2. Hafiz Ashady	_
			3. Suharti	500.000
			4. Dwi Wahyuni K	500.000
			5. M. Iskandarsyah	500.000
			6. Patria Susantosa	500.000
			7. Selamet Budiharto	500.000
			8. Hardi Afriansyah	500.000
			9. Ari Sulindra	500.000
			10. M. Adiwibowo S	500.000
			11. Dian Rahmayanti	-
			12. Sigit Apriyanto	500.000
			13. Himawan Giri Dahlan	500.000
			14. Agung Widayat	500.000
			15. Umi Nurnaeni	=
			16. Sugianto	500.000
			17. Yudi Prasetiawan	500.000

18. Mustika Rosalina Putri	500.000
19. Eva Nurdinna	500.000
20. Andy Martanto	500.000
21. M. Sukron Arif	500.000
22. Firmansyah	500.000
23. Mira Erviana	500.000
24. Andri Priyo Utomo	500.000
25. Deasy Rachmawati	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO